

AFFINTAS

NON-HIERARKI | DEMOKRASI LANGSUNG | AKSI LANGSUNG | PARTISIPASI | OTONOMI | SWA-KELOLA

Editorial

PAGI menghampiri lagi, hari berganti namun tetap membosankan. Pagi yang selalu disambut oleh tuntutan-tuntutan kerja yang memaksa orang-orang bangun dari mimpinya yang indah. Geliat malas dari robot-robot beryawa menghiasi pagi-pagi pucat di setiap jengkal dunia yang didominasi tangan-tangan tak tampak, yang jahat, yang merampas hidup. Bersesakan di jalanan dan bis kota atau dengan mobil yang sejuk menghantarkan semakin sempitnya ruang bernapas ke pembuluh darah yang semakin tertekan. Siapa yang bisa hidup di dunia ini tanpa kerja, atau tanpa mengorbankan hidupnya yang bergairah, atau tanpa melenyapkan naluri petualang untuk berlari dan menari di padang-padang rumput yang menenangkan?

Urut-urati malu yang tersekat-sekat oleh batas teritori dari jiwa-jiwa manusia beradab, menyisakan kelakuan monster yang mampu mencibir ke setiap mereka yang mencoba melawan, atau meludah di hadapan mereka yang berteriak kesakitan, atau menuliskan telinga dari jerit-jerit kematian di sudut-sudut jalan yang jauh. Dan gemuruhnya suara senjata-senjata pembunuh yang masih saja diarahkan ke jantung orang-orang yang nyaris mati. Dunia macam apa ini? Manusia-manusia macam apa ini?

Sejak dunia yang tersekat-sekat oleh batas teritori negara yang semakin tidak berarti di hadapan modal, serta semakin kuatnya imperium kapital yang menganggangi kemanusiaan menjadi sekedar teks-teks di materi perkuliahan, semakin tak sadar kita akan apa yang tengah terjadi. Tak pernah terjamah dengan tuntas mekanisme seperti apa gerakan yang membuat hidup hanya sekedar untuk bertahan hidup.

Kekuatan hegemonik yang membuat kematian habitual tampak tanpa cacat dan melayangnya nyawa menjadi sekedar hitungan statistik yang absen empati. Papua, Aceh, Timur Leste, Pasuruan, dan berbagai kejadian memilukan dan menginjak-injak kemanusiaan yang terjadi di berbagai penjuru dunia semakin tak menarik perhatian dibandingkan dengan tayangan infotainment dan katalog-katalog berlian dan fesyen terkini. Dan pembenaran atas pertahanan integrasi suatu negara, membuat intimidasi menjadi legal dilakukan terhadap mereka yang ingin mengawali hidupnya tanpa sejarah yang cacat.

Kelamnya langit di pematang sawah tempat anak-anak muncul berlian saat hujan tiba, tak cukup membuat miris bos-bos besar yang mempolusikan alam. Semakin lama, semakin terbiasa hingga tak kuasa membedakan siapa kawan siapa lawan. Namun ini bukanlah titik akhir sejarah seperti yang digembar-gemborkan, selama masih ada jiwa yang terusik oleh keangkuhan sistem ini maka sejarah takkan pernah berhenti sampai di sini.

Dan inilah rentetan kata yang terangkai untuk menyibak fakta yang tak diarkani di televisi. Rentetan kata yang ditulis dengan pena bersayap api yang akan membakar semua kebohongan teks-teks otoritarianisme yang telah sekian lama membuat hitam tampak tak manusiawi ketimbang putih. Inilah rintisan untuk mengikis sedikit demi sedikit pilar-pilar kebohongan di dunia yang dibangun di atas bangkai kemanusiaan, untuk sekali lagi merasakan pagi yang ramah bersama anak-anak kita.

MENJELANG berakhirnya pendudukan Belanda, di Papua (dalam teritori Indonesia saat ini menjadi dua provinsi, Irian Jaya Barat dan Papua) terjadi perebutan pengaruh atas wilayah ini antara rezim nasionalisme ekspansionis Soekarno dan blok kapitalis barat, terutama Australia dan Amerika. Beberapa negara lain (Uni Soviet, Belanda, Inggris) dan PBB juga turut andil dalam penentuan nasib wilayah dan masyarakat Papua.

Dengan dibentuknya Komisi PBB untuk Indonesia pada tahun 1949, dan diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar, pergolakan untuk mendominasi Papua telah dimulai oleh Indonesia. Sepanjang dekade 1950-1960, terjadi negosiasi antara rezim kolonial Belanda dan negara pasca kolonial, Indonesia. Rezim kapitalis Blok Barat (Australia, Belanda dan Inggris) juga mulai mempengaruhi konflik dominasi terhadap Papua dengan maksud menhadang pengaruh rezim Soekarno yang berada dalam blok sosialis otoritarian. Bolshevik di Uni Soviet, yang memegang kendali sentralisme sosialis otoritarian internasional, merupakan pendukung rezim-rezim nasionalis di bekas teritori teritori kolonialisme Eropa dalam rangka membangun kekuatan politik sosialis otoritarian di dunia.

Sejak 1957, rezim Soekarno Indonesia memulai serangkaian kampanye agresif dan aksi militer untuk mengkonsolidasikan klaim kekuasaan Indonesia atas wilayah Papua. Soekarno menggunakan sentimen nasionalisme Indonesia untuk memicu kampanye ekspansi teritorial ke Papua, meskipun pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi parah. Pada puncak ambisi ekspansionisnya, yakni antara 1961-1963, rezim Soekarno membelanjakan sekitar 2 triliun dolar AS (sekitar separuh anggaran negara) untuk peralatan militer. Uni Soviet merupakan pendukung utama persenjataan dalam operasi ekspansionisme Soekarno di Papua, dengan kepentingannya untuk membangun satelit-satelit sosialis otoritarian, khususnya di wilayah bekas jajahan kolonial.

Ekspansionisme Soekarno yang didukung rezim Bolshevik Uni Soviet pada era awal Perang Dingin mulai mendapat tantangan dari rezim kapitalis barat. Amerika mulai terlibat aktif dalam isu Papua pada masa pemerintahan Kennedy (1961). Di tahun 1962, Amerika memprakarsai solusi diplomatik untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda dalam isu Papua yang menghasilkan Resolusi PBB Nomor 1752 (dikenal sebagai Perjanjian New York), di mana bagian terpentingnya adalah ketetapan mengenai Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) bagi rakyat Papua.

"Penentuan pendapat", yang dilaksanakan pada tahun 1969, mengawali represi rezim Orde Baru/Soeharto dan kapital internasional (khususnya Amerika), sampai jatuhnya rezim tersebut hingga sekarang; yang dalam rentang hampir empat dekade menerapkan kekerasan dan perampasan dalam skala yang oleh sebagian pihak dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan genosida (Lowenstein dkk., 2003).

Perjanjian Rahasia Roma, tepat seminggu setelah ditetapkannya Perjanjian New York, memuat beberapa butir keputusan yang paling utama adalah tentang kemungkinan pembatalan atau menunda PEPERA. Perjanjian tersebut juga memfasilitasi masuknya kapital melalui butir-butir yang "mewajibkan" Amerika untuk menanamkan modal melalui badan usaha di Indonesia dalam bidang eksplorasi mineral dan sumber daya alam; menjamin pinjaman Bank Pembangunan Asia sebagai dana pembangunan PBB di Papua sebesar 30 juta dolar AS untuk jangka waktu 25 tahun; menjamin Indonesia melalui Bank Dunia dengan sejumlah dana bagi pelaksanaan transmigrasi dalam rangka penempatan orang-orang Indonesia di Papua, terhitung sejak tahun 1977.

Di akhir tahun 1965, selang dua bulan setelah kudeta berdarah September, perusahaan tambang Amerika, Freeport McMoran, menjajaki investasi tambang tembaga di Papua. Dua tahun kemudian, pemerintah Indonesia melengkapi infrastruktur legalnya sebagai wilayah untuk perkembangan kapital dan mengintegrasikan Indonesia ke dalam kepentingan blok kapitalis internasional dengan mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing.

PEPERA kemudian dilaksanakan pada tahun 1969, tapi hanya dengan melibatkan sekitar—atau bahkan kurang dari 1% populasi Papua, yang itu pun dipilih oleh pihak Indonesia dan, dengan pendekatan kekerasan, digiring untuk memilih berintegrasi dengan Indonesia. Pengintegrasian Papua ke dalam teritori kekuasaan Indonesia memulai sebuah era kelam bagi masyarakat di wilayah itu. Berbagai sumber memperkirakan jumlah orang yang dibunuh dan dihilangkan berkisar dari ribuan hingga puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang (Situs Free West Papua, diakses 1 Sept., 2007; Lowenstein dkk., 2003).

Rezim militeristik Orde Baru, yang tak bisa dipungkiri masih utuh hingga saat ini, melancarkan operasi militer, pengontrolan secara militeristik terhadap populasi Papua,

PAPUA BERDARAH: NEGARA, NASIONALISME & KAPITAL MULTINASIONAL

Granat yang digunakan militer Indonesia di tahun 1999, untuk menyerang sebuah demonstrasi di dekat tambang PTFL. Insiden tersebut menewaskan 3 orang sipil dan melukai 175 lainnya. (Sumber: Greenpeace)



dan meminggirkan mereka secara ekonomi, politik dan sosial hampir seluruhnya terjalin erat dengan kepentingan modal multinasional serta mendapat dukungan diplomatik, modal dan militer dari negara-negara blok kapitalis barat. Pembunuhan ekstrajudisial, penyiaksaan fisik, pemerkosaan, teror mental, diskriminasi rasial, penghinaan terhadap kultur Papua terjadi seiring perampasan lahan dan sumber daya alam serta perusakan lingkungan dan sumber mata pencaharian mereka.

Kekerasan Negara, Negara Nasion dan Kapital Multinasional

“Seperti yang dikatakan oleh seorang diplomat Indonesia bahwa Papua Barat baginya adalah “sesuatu yang harus dipertahankan, bahkan dengan mengorbankan nyawanya.” Kenyataannya, Papua Barat telah menjadi “sesuatu yang harus dikorbankan olehnya.” Jason MacLeod

“Seorang komandan KOPASSUS mengatakan bahwa peran militer di wilayah Pegunungan adalah untuk membersihkan wilayah tersebut dari masyarakat indigenous, memastikan agar investor bisa masuk.” RFK & IHRSTAD

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah membebaskan masyarakat yang terjajah oleh rezim kolonial. Namun, sifat progresif dari perjuangan kemerdekaan nasional hanya terjadi dalam konfliknya *vis a vis* rezim kolonial dan setelah itu, kekuatan negara nasion menjadi kekuasaan yang mengendalikan dan merepresi populasi di dalam teritorinya. Negara-negara pasca kolonial di Asia, Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, seperti halnya Indonesia, hampir semuanya berkembang menjadi rezim-rezim despotik dan super korup. *Visi-visi* tentang negara nasion yang akan menciptakan kebebasan dan masyarakat egaliter di wilayah-wilayah pasca kolonial hanya menjadi ilusi-ilusi, seiring pemapanan negara nasion, yang pada intinya adalah pemapanan kekuasaan segelintir elit (representatif) terhadap mayoritas (populasi yang direpresentasikannya).

Sementara itu, hubungan dominan dan subordinat dalam relasi kekuasaan kapitalisme global terus berlanjut pasca era kolonialisme. Negara-negara bekas teritori kolonial tetap berperan sebagai wilayah-wilayah subordinat *vis a vis* negara-negara dominan.

Terbentuknya negara-negara pasca kolonial merupakan perluasan modernisasi kapitalis, setelah sebelumnya kolonialisme mengintegrasikan wilayah-wilayah kolonial ke dalam jaringan kapitalisme global—dengan menundukkan rezim-rezim feodal dan membangun wilayah-wilayah tersebut sebagai penyangga sektor-sektor industri ekstraktif dan agrikultur.

Hubungan dominan-subordinat dalam relasi kekuasaan global, yang sempat diinterupsi oleh perjuangan-perjuangan kemerdekaan kolonialisme, kini kembali ke titik keseimbangannya. Pasca perjuangan kemerdekaan nasional, institusi dan aparatus negara nasion pasca kolonial menjadi fasilitator bagi aktor-aktor kapital dari negara-negara dominan untuk mengakses teritori, sumber daya dan populasi di wilayah-wilayah tersebut. Negara nasion pasca kolonial menjalankan fungsinya sebagai fasilitator modernisasi kapital, khususnya dalam era developmentalisme, di mana terjadi perluasan infrastruktur untuk kegiatan-kegiatan industrial, intensifikasi ekstraksi sumber daya alam, pendisiplinan populasi menjadi sumber daya manusia dan perkembangan pasar bagi komoditas. Negara nasion Indonesia, melalui represi fisik dan mental terhadap populasi di

dalam teritorinya, menjalankan perannya dalam menciptakan iklim investasi bagi kapital multinasional, terutama sejak naiknya rezim militeristik Orde Baru. Penciptaan iklim investasi, yang diawali dengan pengorbanan jutaan jiwa, selanjutnya dimampukan dengan berkuasanya rezim Orde Baru. UU Penanaman Modal Asing diberlakukan dua tahun setelah pembantaian September 1965, sebagai kerangka legal yang menjamin keamanan investasi dan pemberian konsesi-konsesi kepada kapital multinasional. Negara nasion ini menjalankan peran subordinatnya (untuk memfasilitasi kapital multinasional) sebagai penjaga kapital dan mediasi antara kapital dan populasi lokal.

Negara Nasion Indonesia dan kapital multinasional membangun jalinan eksploitasi brutal terhadap populasi dan lingkungan di wilayah Papua. Kapital multinasional, yang melakukan investasinya di wilayah yang begitu kaya akan sumber daya alam ini, menempatkan negara Indonesia pada peran pendisiplinan populasi yang bergolak.

Operasi militer di Tanah Papua dimulai secara *de facto* pada waktu bermulanya penduduk Indonesia atas Papua pada tahun 1963 dan makin represif ketika secara *de jure* Papua menjadi DOM yang paling lama di Indonesia, dari 1978 sampai tanggal 5 Oktober 1998 (20 tahun). Sementara itu, "peresmian" aneksasi Papua melalui PEPERA merupakan proses yang diatur oleh kekerasan negara (berlangsung dua tahun setelah Freeport McMoRan, kapital multinasional terbesar di Papua, beroperasi). PEPERA, menurut beberapa diplomat, merupakan proses jajak pendapat yang dipenuhi ancaman kekerasan dan pembunuhan terhadap wakil-wakil yang memilih opsi kemerdekaan untuk Papua (J. Salford, 2003).

Sepanjang dekade 1970an, Indonesia mulai melancarkan operasi-operasi militer, yang ditujukan bukan hanya pada pasukan, simpatisan dan aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetapi juga terhadap masyarakat sipil. Berbagai operasi militer itu berimbas pada masyarakat sipil, termasuk teror mental (eksekusi publik dan mutilasi orang yang sudah dibunuh), ancaman-ancaman pada masyarakat sipil dan pemboman desa-desa. Pemboman besar-besaran terjadi pada 1977-1978 di Akimuga, desa-desa di Jayawijaya dan desa-desa di perbatasan dengan Papua New Guinea.

Operasi Sapu Bersih merupakan operasi ganas yang dilancarkan di awal 1980an. Operasi ini menargetkan orang-orang yang terlibat OPM dan juga sanak keluarga mereka. Salah satu insiden horor dalam peristiwa tersebut adalah pemboman desa Madi di Paniai, dengan dugaan korban jiwa antara 2.500 sampai 13.000 orang (Osborne, 1985). Pembunuhannya 200 desa dan pembantaian 517 warga sipil terjadi di Enarotali pada tahun 1985. Kekerasan-kekerasan negara oleh militer Indonesia (penyiksaan, pemerkosaan, penembakan masyarakat sipil) terus berlanjut sampai hari ini. Dari peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap masyarakat sipil yang terdokumentasikan, tercatat juga insiden pada Natal 1994 dan insiden Mei 1995. Selain itu, pembunuhan, eksekusi serta pembakaran gereja dan gedung juga terjadi sepanjang periode 1996-1997. Pada bulan Mei 1998, militer membunuh 8 orang yang terlibat dalam pengibaran bendera Papua. Di tahun 2000, terjadi insiden pembunuhan dan penyiksaan yang melibatkan Brigade Bermobil (Brimob) dan Polisi Anti Huru Hara (PHH), yang disusul insiden serupa dua bulan berikutnya. Operasi-operasi "pembersihan" juga terus dilakukan--di wilayah Kiyawage (2003), Puncak Jaya (2004), Tolikara (Januari-Maret, 2005) (West Papua News, 24 Januari, 2005), Tinginamput (Agustus-Oktober 2005) (Human Rights Watch, 2007).

Militer Indonesia di Papua mempunyai kepentingan sangat besar dalam sektor-sektor ekstraksi sumber daya alam, melalui keterlibatannya secara langsung dalam industri kayu, perikanan dan pertambangan serta dana-dana dari industri ekstraksi yang dibayarkan sebagai uang pengamanan.

Benih-benih konflik antara kepentingan negara dan modal di satu pihak, dan hak-hak hidup masyarakat *indigenus* Amungme di Tembagapura dan Komora di Mimika di pihak lain, berawal pada tahun 1967 ketika PT Freeport Indonesia (PTFI), yang sekarang merupakan *joint venture* antara Freeport McMoRan dan Rio Tinto, menandatangani Kontrak Karya dengan pemerintah Indonesia. Kontrak Karya yang disusun oleh PTFI memberi korporasi ini lingkup kekuasaan yang besar terhadap masyarakat *indigenus* dan sumber daya alam di sana--termasuk kekuasaan untuk mengakses tanah dan merelokasi masyarakat, sekaligus penghilangan akses masyarakat *indigenus* untuk menuntun atau

menolak beragam kegiatan dan pengambilalihan dalam operasi PTFI.

Selama beberapa dekade, operasi pertambangan PTFI di Papua tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan militer Indonesia. Hubungan modal dan institusi serta aparatus kekerasan tersebut telah menimbulkan banyak korban dalam konflik-konflik kepentingan antara masyarakat dan korporasi.

PTFI telah memberikan beragam fasilitas, logistik, akses ke infrastruktur PTFI dan pembayaran finansial kepada militer Indonesia. Sebuah laporan, yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional mengenai *Tentara dalam Bisnis*, mencatat pembayaran yang dilakukan PTFI di antaranya berjumlah 35 juta dolar AS, selain juga pembayaran tahunan sebesar 11 juta dolar AS. Komisi Hak Asasi Manusia, pada bulan September 1995, menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang jelas dan dapat diidentifikasi di dalam dan di sekitar wilayah operasi PTFI, termasuk pembunuhan, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, penangkapan secara ilegal, penghilangan orang, penahanan secara tidak sah, pengawasan berlebihan dan perusakan properti--terkait langsung dengan militer Indonesia yang menjadi pemangan bisnis tambang PTFI.

Kekerasan negara (atau yang difasilitasi oleh negara), dan yang melibatkan kapital multinasional, juga meliputi salah satu sektor industri terbesar di Papua, yaitu industri kayu dan kertas. Pengambilalihan lahan masyarakat oleh investasi-investasi di sektor tersebut kerap terjadi di Papua. Pada tahun 1982, beberapa koran melaporkan kerja dengan upah rendah yang diterapkan pada masyarakat Asmat oleh industri kayu dengan melibatkan aparat desa. Militer Indonesia di Tiga Danau juga dilaporkan terlibat dalam skema-skema kerja paksa dalam ekstraksi kayu. Menurut aktivis TELAPAK, militer di Papua merupakan salah satu pihak kunci yang terlibat dalam ekstraksi kayu ilegal di wilayah itu (Environment News Service, Febuari 2005).

Sejak jatuhnya rezim Soeharto dan melemahnya Orde Baru, pengamanan terhadap modal oleh militer telah mengalami perubahan pola, di mana militer mengurangi keterlibatannya secara langsung untuk kemudian melibatkan taktik pembangunan militer--milisi sipil guna meredam potensi-potensi konflik terhadap kepentingan modal.

Di beberapa wilayah, seperti Sorong dan Fak Fak, Laskar Jihad dan milisi nasionalis digunakan untuk mengacaukan situasi dalam rangka mendiskreditkan resistensi yang diorganisir oleh masyarakat untuk menyuarkan aspirasi akan hak mereka atas akses pendidikan, ekspresi/identitas budaya, akses politik dan akses ekonomi.

Skema rekayasa konflik yang diterapkan militer mengambil pola yang diterapkan militer Indonesia di Timor Leste sebelum kemerdekaannya. Milisi-milisi dibentuk untuk meningkatkan intensitas konflik yang bertujuan sebagai pembenaran untuk melakukan agresi terhadap gerakan resistensi dan menghancurkan, selain juga untuk memecah-belah masyarakat Papua.

Kemunculan kelompok-kelompok milisi yang berada dalam payung Forum Kebangsaan di Papua, dan peran Kolonel Burhanuddin Siagian (tertuduh sebagai aktor dalam kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste pada panel khusus di Dili) sebagai Komandan Resor Militer 172 Jayapura, mengindikasikan adanya pola-pola kekerasan seperti yang pernah terjadi di Timor Leste.

Genosida(?): Kekerasan Negara & Rasialisme

Nasionalisme Indonesia, seperti halnya nasionalisme di bekas wilayah-wilayah kolonial, mendasarkan klaim teritorialnya pada teritori pemerintahan kolonial yang berkuasa sebelum kemerdekaan nasional. Anggapan bahwa segala yang merupakan peninggalan dominasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda harus kemudian menjadi dominasi kedaulatan nasional Indonesia, merupakan konsepsi teritorial Indonesia.

Nasion, meminjam istilah Benedict Anderson, adalah konsepsi tentang "komunitas yang dibayangkan", di mana anggota sebuah nasion membentuk komunitas tidak melalui interaksi fisik, tapi melalui pembayaran mental tentang kesamaan-kesamaan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang saling membayangkan tersebut. Di sini nasionalisme Indonesia mengangankan kelompok-kelompok masyarakat yang saling membayangkan diri dalam suatu komunitas Indonesia yang mungkin

Wawancara Dengan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Yogyakarta

(Wawancara dilakukan oleh partisipan Affinitas dengan Fidel Tinus dari AMP)

Pertama, mungkin bisa diceritakan bagaimana bentuk organ, pandangan/platform politik AMP?

Baiklah, kawan-kawan, salam pembebasan! AMP berdiri tahun 1998, kawan-kawan. Saat itu AMP, khususnya di Yogyakarta, sempat mengangkat isu tentang kejahatan militer di Papua, yang lebih spesifiknya bagaimana kemudian Soeharto lengser pada tahun 1998. Waktu itu AMP dibentuk di Jakarta, dan disepakati bahwa AMP memiliki struktur secara nasional maupun internasional. Dan AMP secara strukturnya terdiri atas partisipan di beberapa negara, khususnya di Indonesia, di luar negeri seperti Australia, Irlandia, Inggris, Jepang, Belanda dan beberapa negara yang biasa berkomunikasi dengan kami.

Kemudian ketika kami bicara masalah latar belakang atau sejarah AMP, kenapa AMP harus berdiri, sebagai stratak (strategi & taktik--red.) dan platform dari yang lama hingga detik ini, bahwa AMP harus melawan imperialisme, karena imperialisme adalah musuh kita bersama, kemudian feodalisme, neokolonialisme, militerisme. Ada beberapa stratak dan platform, yang kemudian AMP merasa terdorong, termotivasi ketika melihat kebijakan-kebijakan yang ada, terutama rezim yang tidak berpihak pada rakyat Papua. AMP sendiri, lebih spesifiknya, bersama rakyat dalam hal memperjuangkan hak-hak dasar rakyat Papua yang tidak terlepas dari isu *self determination* (hak untuk menentukan nasib sendiri--red.).

Beberapa waktu lalu kami mendengar kabar adanya represi terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta. Bisa anda ceritakan tentang insiden itu?

Soal represi terhadap kami, bagi kami, baik masyarakat di Papua maupun mahasiswa Papua di Yogyakarta, sesungguhnya, berdasarkan UUD '45 Pasal 28, kami mempunyai kebebasan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain agar mereka mengerti apa yang menjadi keinginan rakyat Papua. Misalnya, penarikan militer dari Papua. Kenapa mesti begitu? Karena militer di sana bukannya melindungi rakyat, tapi justru membunuh rakyat banyak, termasuk mahasiswa. Melihat represi-represi seperti ini, AMP, sebagai gerakan yang memihak rakyat, akan selalu melawan represi dan kebijakan militer yang tidak berpihak kepada rakyat.

Kemudian di tingkatan mahasiswa, kemarin 4 Juli kawan-kawan melakukan aksi seputar *self determination*, tapi kami direpresi karena katanya kami melanggar hukum. Oke, kami mengakui, tapi kami mempunyai hak kebebasan berpendapat yang harus kami sampaikan pada orang lain. Setelah itu, ada tanggapan dari banyak pihak, baik yang positif maupun negatif; salah satunya, kami direpresi oleh militer. Pasca kedatangan Ibu Menteri Selandia Baru, dua truk tentara, dua truk polisi, dua truk Brimob, datang kemari. Saya selaku koordinator kawan-kawan di sini (Asrama Papua--red.) hampir

ditangkap, tapi saya meloloskan diri. Tapi kami masih tak mengerti di mana letak kesalahan kami. Mau ditanggapi atau tidak itu terserah, tapi kami harus menyampaikannya agar tidak ada dusta di antara kita, jadi saya harus menyampaikan semua itu kepada orang-orang.

Tadi Bung menyebutkan persalsolan pelanggaran hukum. Dalam aksi yang dilakukan kawan-kawan AMP, yang dimaksud melanggar hukum itu sisi apanya?

Waktu itu kami mengangkat isu *self determination* dan angkat apa yang menjadi hak-hak mendasar rakyat Papua. Menurut Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001, Bintang Kejora bukanlah lambang negara, melainkan lambang budaya. Undang-Undang itu juga mengisyaratkan bahwa ini lambang budaya, dan aksi kami menggunakan simbol itu juga sebagai lambang budaya, tapi TNI dan Polri menganggap bahwa hal ini sangat melanggar UUD '45, maka harus dibubarkan, hingga akhirnya kami direpresi. Sampai-sampai kawan-kawan dari beberapa paguyuban yang ada di sini, sebanyak 23 asrama dan 1 pusat asrama mahasiswa Papua diteror. Kami didatangi, bahkan juga diperiksa. Semua logo dan pakaian diperiksa. Hal seperti ini sering terjadi pada rakyat Papua. Misalnya di Papua, ketika itu ibu-ibu yang biasa berjualan dan memakai pakaian yang bergambar itu (Bintang Kejora--red.) dipaksa oleh oknum TNI/POLRI untuk membuka baju, jadi mereka tinggal pakai bra saja. Kalau seperti ini, kemanusiannya di mana?! Ini kan cuma baju, cuma gambar saja!

Kami mendengar kabar bahwa setelah aksi kalian itu, seorang oknum pemerintah pernah mengeluarkan pernyataan akan mengusir mahasiswa Papua. Apakah ini benar?

Tanggal 5 Juli, Gandung Pardiman, sebagai wakil ketua DPRD DIY, melakukan jumpa pers dengan *Kedaulatan Rakyat* dan *Jawa Pos*, dan dia menyatakan sikap bahwa aksi-aksi ini, isu-isu mengenai separatisme, sangat meluas sehingga separatisme harus diusir dari DIY; dan itu ditujukan kepada mahasiswa Papua. Okelah, kami bicara masalah separatisme, tapi apa sebenarnya arti separatisme? Boleh dibalang, setiap kelompok apapun yang menyatakan sikap atau memperjuangkan sesuatu... misalnya, kalau yang melakukan terorisme dan lain-lain, itu masuk separatisme atau tidak? Kenapa beliau bisa mengatakan hal itu kepada mahasiswa Papua?! Tapi hari ini bukan hanya kami, mahasiswa Papua, semua yang menyatakan sikap yang menentang pemerintahan juga tuduh separatist. Dan Pak Gandung Pardiman juga menginstruksikan TNI/Polri agar segera mengambil tindakan keras terhadap aksi-aksi separatist. Misalnya sehubungan dengan kawan-kawan RMS, Papua dan Aceh, artinya kenapa pemerintah tidak menyikapi aksi-aksi mahasiswa Aceh dan RMS yang selama ini ada di seluruh Indonesia?! Kenapa hanya

berdasarkan pembayangan kesamaan senasib sepenanggungan selama penjajahan kolonial Belanda. Namun demikian, seperti kita ketahui, tidak seluruh wilayah yang sekarang merupakan teritori Indonesia mengalami rentang masa penjajahan kolonial yang sama, bahkan ada sebagian dari wilayah-wilayah tersebut yang hampir tidak pernah terjajah sama sekali.

Konsepsi ala Anderson dipertanyakan: Siapa yang berhak membayangkan nasion? Apa konsekuensi dari pembayangan yang dilakukan oleh segelintir kelompok masyarakat dari kelompok (etnis) tertentu, sementara pembayangan itu mencakup banyak kelompok masyarakat lainnya? Pembayangan tentang Indonesia, pencetusan tentang Indonesia, itu sendiri sebagian besar diartikulasikan oleh segelintir orang dari kelompok etnis Jawa dan Melayu (khususnya merujuk pada populasi di pulau Sumatera dan sekitarnya) sebuah pembayangan tentang komunitas yang mencakup lebih dari 300 kelompok etnis.

Gejolak Papua merupakan konsekuensi dari pembayangan nasion oleh elit Jawa dan Melayu yang dipaksakan terhadap populasi Papua. Nasionalisme Indonesia yang Jawasentris mendapatkan legitimasinya dari kuasa mayoritas Jawa dan Melayu, dari pandangan yang menganggap kelompok-kelompok (etnis) minoritas sebagai terbelakang. Terminologi-terminologi seperti "masyarakat terasing", "masyarakat zaman batu primitif", digunakan sebagai label yang memberikan identitas kepada kelompok mayoritas sebagai "baik" dan "superior" dan kelompok minoritas sebagai "terbelakang" dan "tidak beradab". Identitas superior ini memberikan legitimasi untuk mengendalikannya yang "terbelakang" dan "tidak beradab" dengan program-program yang disusun negara.

Nasionalisme Indonesia Jawasentris, yang mendefinisikan cita-citanya dalam modernisasi kapitalis Dunia Ketiga yang dikenal dengan developmentalisme, memberikan pembenaran lebih jauh untuk menerapkan "kemajuan peradaban" ini pada populasi-populasi yang dianggap tidak beradab. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai program untuk membawa populasi-populasi "terasing" masuk ke dalam arus utama pembangunan dengan segala cara. Di satu sisi, pendisiplinan kelompok-kelompok "masyarakat terasing" dibenarkan oleh premis "membawa kebaikan peradaban" kepada mereka. Di sisi lain, adalah kebutuhan untuk mengakses wilayah dan populasi "terasing" bagi kepentingan modernisasi kapital.

Pendudukan, Indonesia di Papua selama lebih dari 40 tahun telah menyingkirkan ratusan ribu penduduk Papua melalui pembunuhan, penghilangan dan penciptaan kondisi represif yang memaksa orang untuk meninggalkan daerah asalnya. Bagi sebagian pihak, skala pelanggaran HAM di Papua dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan sebagian lagi menilainya sebagai genosida.

Lebih jauh, beragam bentuk intervensi pemerintah Indonesia juga telah menimbulkan korban jiwa secara tak langsung, antara lain relokasi penduduk secara paksa, perusakan lahan-lahan yang menyediakan kebutuhan pangan dan dugaan adanya penyebaran penyakit (*cysticercosis*) pada masyarakat tribal Ekari.

Berbagai kebijakan pemerintah Indonesia di bidang keamanan, politik dan sosial di Papua bertujuan untuk meminggirkan akses politik dan ekonomi masyarakat Papua serta melenyapkan identitas orang Papua yang menjadi penghalang bagi operasi kekuasaan elit politik dan akses ekonomi aktor-aktor modal multinasional.

Peminggiran akses politik masyarakat Papua dan penghilangan identitas orang Papua secara sistematis dilakukan beberapa tahun sebelum diselenggarakannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969. Untuk memastikan keberhasilan aneksasi Papua ke dalam teritori Indonesia, sejak tahun 1963 pemerintah Indonesia mulai melakukan intervensi-intervensi untuk menghilangkan identitas orang Papua dengan, melalui dekret presiden, melarang dinyanyikannya lagu nasional Papua dan pengibaran bendera Bintang Kejora--sebuah ketentuan hukum yang kemudian diterapkan secara lentur untuk mengait-ngaitkan beragam ekspresi lainnya sebagai subversif terhadap Indonesia.

PEPERA yang diklaim sebagai usaha memfasilitasi masyarakat Papua untuk menentukan pilihannya sendiri, ironisnya tidak melibatkan satu pun elemen masyarakat Papua. Proses PEPERA bahkan tidak memberlakukan sistem satu orang satu suara, dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Papua dan kondisi

geografisnya yang sulit. Di sisi lain, kebijakan rasialis Indonesia dalam PEPERA juga didukung kondisi politik internasional yang rasis, seperti yang tercermin dalam pernyataan seorang diplomat Inggris pada tahun 1968:

"Saya tidak bisa membayangkan bahwa pemerintah Amerika, Belanda, Jepang atau Australia, mempertaruhkan...hubungan mereka dengan Indonesia atas alasan prinsipil hanya untuk orang-orang yang sangat primitif, dalam jumlah yang relatif kecil."

Salah satu kebijakan rasialis yang memarjinalkan masyarakat Papua adalah program transmigrasi Orde Baru pada pertengahan 1980-an yang diimplementasikan atas prinsip asimilasi--untuk menghilangkan-lenyapkan etnis Papua dengan memfasilitasi perpindahan orang-orang dari luar (Papua) "yang lebih beradab" ke Papua. Sampai pertengahan 1986, dengan program transmigrasi telah dipindahkan 27.726 keluarga (hampir 140.000 orang) ke Papua (Budiardjo & Liong, 1988).

Mochtar Kusumaatmadja, Menteri Luar Negeri di masa rezim Orde Baru, mengatakan bahwa transmigrasi mungkin merupakan satu-satunya cara untuk membawa masyarakat zaman batu yang primitif ke dalam arus utama pembangunan Indonesia.

Dalam kebijakan transmigrasinya, pemerintah bukan hanya tidak melakukan konsultasi dengan masyarakat Papua, melainkan juga mengambil lahan-lahan dari para pemilik tradisionalnya dan mengusir penduduk lokal dengan ancaman, kekerasan fisik dan bahkan pembunuhan (Osborne, 1985; Budiardjo & Liong, 1988). Slogan militer yang terkenal pada saat berlangsungnya operasi tersebut adalah "Biarkan tikus lari ke hutan, agar ayam-ayam bisa berkembang biak di kandangnya." Lahan-lahan yang diambil untuk para transmigran juga banyak yang diperoleh dengan penipuan dan ancaman terhadap pemiliknya (Lowenstein dkk, 2003). Bank Dunia juga telah mengucurkan dana sebesar US\$ 650 juta untuk program transmigrasi pemerintah Indonesia.

Selain transmigrasi sebagai salah satu proyek rasialis untuk "memperadabkan" masyarakat Papua, proyek lainnya adalah Proyek Pembinaan Masyarakat Terasing yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia di Papua. Proyek ini, sebagai bagian dari kebijakan rasialis lainnya, secara konsisten ingin menanamkan stigma pada masyarakat Papua bahwa mereka adalah orang-orang yang inferior.

Berkembangnya epidemik *cysticercosis* di kalangan masyarakat tribal Ekari, yang diduga diintrodusir oleh pemerintah Indonesia, mengingatkan kita pada genosida masyarakat *indigenous* Amerika melalui penyebaran penyakit cacar. Menurut tenaga medis di rumah sakit Enarotali, cacing pita penyebab penyakit tersebut berasal dari "hadiah untuk perdamaian" berupa babi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia setelah operasi kontra insurgensi militer yang berlangsung dalam periode yang panjang. Terlepas dari dugaan penyebaran penyakit tersebut, adalah kelambanan respon dari otoritas kesehatan pemerintah untuk mengatasinya dengan alibi bahwa *cysticercosis* merupakan penyakit prioritas rendah (*Tempo*, 6 Agustus, 1983).

Kebalikan dari klaim perbaikan kondisi masyarakat, proyek-proyek pemeradaban ini malahan memperburuk kondisi masyarakat Papua. Peradaban yang dibawa oleh pemerintah Indonesia ini menyebabkan hilangnya lahan produktif (dirampas), munculnya penyakit-penyakit yang sebagian berkembang dalam skala epidemik dan bencana lingkungan yang mencemari sumber-sumber pangan, merusak atau menghancurkannya dan merusak ekosistem pendukung regenerasi sumber-sumber tersebut--akibat-akibat yang, langsung atau tidak langsung, berimbas pada *survival* orang Papua. Buruknya layanan kesehatan pemerintah yang "beradab" bagi masyarakat yang "tidak beradab" ini juga berkontribusi dalam memperburuk kondisi masyarakat Papua.

Proyek-proyek pemeradaban tersebut, khususnya transmigrasi, bagi sebagian pihak dipandang sebagai intervensi yang jelas merupakan penciptaan kondisi kehidupan yang diperhitungkan dalam rangka pemusnahan (identitas) masyarakat Papua. Pemerintah Indonesia tentunya mengetahui bahwa kebijakan-kebijakan pemeradabannya akan berakibat pada pemusnahan fisik dan kultural masyarakat *indigenous* Papua.

Di Yoga sepertinya terbangun stereotip rasial terhadap warga Papua, terutama bila kita lihat media menyiarkan beberapa kasus perkelahian antara mahasiswa Papua dan warga Yoga. Aksi-aksi kalian pun langsung diidentikkan dengan separatisme. Apakah AMP melihat bahwa ada semacam konspirasi untuk memojokkan mahasiswa Papua, dan sengaja membangun sentimen rasial terhadap mahasiswa Papua, untuk menutupi persoalan-persoalan yang lebih konkret seperti pelanggaran HAM yang terjadi di sana?

Tadi saya hampir lupa bahwa belakangan ini citra publik terhadap mahasiswa Papua, khususnya AMP, adalah tukang bikin rusuh dan sebagainya, tapi sesungguhnya ada oknum-oknum tertentu yang membuatnya, dan kemudian berimbas kepada mahasiswa Papua secara keseluruhan. Misalnya, akhir-akhir ini masyarakat menganggap bahwa mahasiswa Papua itu selalu mabuk, tukang minum, dan lain-lain. Tapi itu kan oknum-oknum saja, tidak semua mahasiswa Papua, khususnya di Jawa atau di Yogyakarta. Teman-teman di Yoga ini, misalnya, ketika ada citra orang Jawa memeras orang Papua, orang ini memeras orang ini, orang Jawa yang selalu monopoli sistem pemerintahan, dan lain-lain, misalnya ada citra lagi bahwa orang Jawa yang di Papua itu kaya-kaya, dan lain-lain, kami menganggapnya hanya sebagian, bukan semua. Sesungguhnya, ini hanya oknum-oknum tertentu, tidak semua masyarakat. Artinya, ini paket kebijakan imperialisme, yang membuat yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin.

Sekali lagi, tidak semua mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta selalu membuat rusuh atau ketidaknetanan pada rakyat Yogyakarta atau masyarakat Indonesia. Tapi kemudian, HAM itu tercipta ketika ada masalah, misalnya kasus Pingit kemarin, kenapa harus mahasiswa Papua melakukan aksi brutal pada tanggal 9 di Pingit. Ada sebab-akibat, hingga mahasiswa Papua melakukan aksi seperti itu. Kalau mahasiswa Papua melakukan kebrutalan, itu tidak semua mahasiswa, tapi hanya oknum yang kemudian mengklaim bahwa itu semua mahasiswa Papua keseluruhan.

Kami pernah membaca di website kabarpapua.com bahwa ada tuntutan untuk sebuah referendum yang difasilitasi PBB, yang berbeda dengan Pepera '69, yakni menginginkan adanya satu orang satu suara. Misalkan ini gol dan Papua lepas dari kolonialisme Indonesia, apakah bukan tidak mungkin yang akan terjadi hanya seperti "keluar dari mulut singa, lalu masuk ke mulut buaya"? Tetap saja akan terbentuk pemerintah baru, yang kemudian agenda-agenda imperialis masih bisa masuk ke Papua. Bagaimana pendapat anda?

Memang seperti kasus sekarang yang sedang dihadapi kawan-kawan Timor Leste; artinya, mereka hanya ganti baju, tapi oknum-oknumnya tetap sama, bahwa imperialisme masih juga menjajah mereka. Tapi AMP, dalam hal ini, punya sikap jelas bahwa imperialisme tetap musuh rakyat, dan kami bicara masalah *self determination* itu sejak 1999, yang dalam hal ini sesungguhnya murni suara rakyat yang harus disampaikan. Tapi, karena di sana juga ada kepentingan imperialisme, sehingga nasib rakyat selalu terpinggirkan, maka hingga detik ini AMP selalu menyuarakan untuk segera dilakukan di di

Pak Gandung juga menyampaikan bahwa jika aparat keamanan TNI/Polri tidak mengambil tindakan tegas terhadap aksi-aksi separatistis, maka rakyat Yogyakarta yang cinta NKRI, cinta Yogyakarta damai, akan mengusir para separatistis, dalam hal ini mahasiswa Papua. Oke, kita lihat dulu, apakah ini sikap oknum tertentu ataupun rakyat Yoga secara keseluruhan. Kami juga menggalang solidaritas, aksi dan diskusi tentang separatisme, dan justru ada beberapa tokoh dan pihak-pihak yang mengancam keras Pak Gandung bahwa dia tidak melihat, dia bicara hanya sembarangan, semena-mena. Kalau memang warga Yoga mengusir rakyat Papua yang ada di DIY, kami siap pulang dengan catatan bahwa rakyat Indonesia yang ada di Papua, dengan hitungan yang sama, misalnya mahasiswa Papua di Yoga berjumlah 4.100 orang menurut data tahun 2006, untuk 2007 kami belum menghitung; artinya 5.000 atau 10.000 mahasiswa Papua di Yoga dan se-Jawa-Bali sepakat bahwa kalau kami direpresi, kami siap pulang. Tapi ingat, dengan konsekuensi bahwa rakyat non-Papua yang ada di Papua juga harus kembali. Kami akan pulang, sebanding dengan jumlah kami yang pulang. Seperti itu, kami juga merasa kesal dengan sikap wakil rakyat yang semestinya melindungi dan berdiskusi dengan kami layaknya bapak dan anak, tapi dia malah memvonis. IPMP (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua), AMP dan Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat sangat kecewa terhadap sikap beliau yang dalam hal ini merupakan seorang wakil rakyat. Jadi, kalau rakyat Yoga akan memulangkan mahasiswa Papua, kami siap pulang dari Yoga, atau seluruh mahasiswa Papua se-Jawa-Bali akan siap pulang, dengan konsekuensi beberapa orang non-Papua yang berada di sana juga harus pulang.

Belakangan ini muncul sentimen publik terhadap warga Papua, seperti citra bahwa orang Papua itu "tukang bikin rusuh" dan lain-lain, bahkan ada yang mengarah ke sentimen berbau rasis. Bagaimana menurut anda?

Yang jelas, AMP tidak memandang apakah kamu orang Barat, Timor, hitam atau putih, tapi AMP punya pandangan yang luas. Jadi, ras itu tidak penting; yang terpenting adalah harus melawan imperialisme. Dalam hal ini, ketika ada imperialisme, maka akan ada banyak perbedaan yang muncul. Contohnya seperti Freeport; Freeport hanya memprioritaskan 7 suku. Yang jadi masalah, Freeport ini kan ada di Papua, maka seluruh rakyat Papua juga berhak mendapatkan hasil dari Freeport. Lebih luas, Freeport berlokasi di Papua, tapi Papua ada di dalam NKRI, maka rakyat non-Papua juga berhak mendapatkan hasil dari Freeport. Tapi kemudian imperialisme sengaja melakukan pengkotak-kotakan, sektor ini sektor itu, memecah-belah kepentingan rakyat, memanfaatkan isu demi kepentingan sekelompok orang dan memanfaatkannya.

Pandangan AMP tentang rasisme, sesungguhnya kalau isu internasional yang diangkat itu tentang *self determination*, maka benarlah bahwa AMP merupakan bagian dari rakyat tertindas, khususnya rakyat sangat marginal di Papua, dan harus mengangkat apa yang menjadi aspirasi masyarakat Papua. Kemudian, tak bisa dipungkiri, kami adalah orang Papua. Kapanpun dan di manapun, orang Papua ya tetap orang Papua. Tapi kemudian yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita pahami bersama, musuh besar kita yang selalu menyetir kita ini siapa? Ya, lagi-lagi imperialisme.

pelurusan Pepera '69, sebab yang terjadi di sana pada waktu itu cacat hukum.

Kembali ke persoalan imperialisme. Wah, jangan-jangan ketika Papua terlepas dari NKRI atau dari kolonialisme, akhirnya kembali masuk ke dalam imperialisme. Di sini perlu digarisbawahi, bahwa sistem pemerintahan Papua yang ditawarkan kepada rakyat Papua dan mahasiswa Papua adalah sosialisme tribal demokrasi. Papua terdiri dari suku-suku sebanyak 214 suku dan 500 sekian bahasa. Dan ini sangat tidak mudah untuk berubah dalam jangka waktu dekat. Tapi, bagaimana bila nantinya dari mulut harimau masuk ke mulut binga atau buaya; jadi artinya hanya ganti baju, tapi orangnya sama saja. Ya kami bicara masalah imperialisme, bahwa itu tergantung, pemimpin kamu menganut sistem pemerintahan apa. Misalnya, Indonesia dulu waktu zaman Soekarno sudah menjalin hubungan dengan negara sosialis, salah satunya Kuba. Tapi, karena kepentingan imperialisme juga terpaksa Soekarno lengser, dan digantikan Soeharto. Pemimpin seperti apa... misalnya, presiden kamu harus menganut sistem apa... Saya kira imperialisme merupakan sistem yang memang harus kami lawan. Nah, dengan tawaran sistem sosialisme tribal demokrasi *West Papua*, saya kira rakyat yang akan menerima hal itu. Ada beberapa bahan yang sedang disosialisasikan dan didiskusikan oleh kawan-kawan. Misalnya, kamu punya saya punya; artinya, jika kamu punya HP, saya juga harus punya HP. Ini artinya duduk sama rata dan berdiri sama tinggi. Saya teringat, Fidel Castro dan Che (Che Guevara--red.) pernah memberi pendidikan politik terhadap anak didiknya bahwa kita punya bersama, dan di antara kita tidak ada yang berlebih, tidak ada yang kekurangan; kita sama.

Bisa jelaskan sedikit tentang konsep demokrasi tribal?

Jadi, kembali lagi bahwa Papua itu luasnya tiga kali lipat pulau Jawa, dan ini sangat tidak mudah untuk dijangkau. Tapi kemudian, ketika rakyat Papua merasa bahwa saya adalah bangsa Papua, dan saya tidak akan pernah jadi orang Amerika, di situlah nanti akan terbentuk pemahaman bahwa kamu bagian dari saya, maka kami harus duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Nah, dalam rancangan sosialisme tribal demokrasi, misalnya di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain, hal-hal ini semua berasal dari dan untuk rakyat. Jadi, misalnya, sistem pemerintahan negara atau kelompok, jika berjalan, harus menerapkan tiga pokok pandangan itu. Dalam pengagasan sosialisme tribal demokrasi, tiap suku berhak atas hak-hak ulayatnya, dalam hal ini baik SDA (sumber daya alam--red.) maupun SDM (sumber daya manusia--red.) yang juga seisinya, khususnya di suku tersebut. Jadi, dalam hal ini, suku besar tidak berhak menindas suku kecil. Artinya, diotonomikan, diberikan langsung kepada suku tersebut bagaimana dia akan mengatur sesuai aturan hak adat yang berlaku. Kami bicara masalah hak adat, dan hingga detik ini pun hukum adat diakui oleh masyarakat, khususnya daerah pegunungan tengah, pesisir, dan seluruh masyarakat Papua mengakuinya sampai detik ini. Kawan-kawan berinisiatif bahwa sosialisme tribal demokrasi itu solusi, bukan hanya ganti baju, tapi semuanya harus tergantikan dari bahaya imperialisme. Saya kira itu.

Selanjutnya, apa agenda AMP untuk meneruskan perjuangan?

Mungkin saya coba tambahkan sedikit tentang represi, bahwa hingga detik ini, rakyat Papua berada dalam situasi perang. Ribuan personil militer diterjunkan ke sana, seperti halnya di Aceh dan Timor Leste dulu. Dan hingga detik ini pun milisi-milisi juga banyak yang diciptakan oleh militer itu sendiri, dan logistiknya pun disiapkan oleh RI 1,

yang tidak lain adalah akses militer, dan dia adalah orang militer. Kembali lagi ke soal represi, bahwa khusus mahasiswa Papua di Yogya, kami berada dalam situasi yang sangat tidak nyaman. Ini menyangkut psikologi, bagaimana kami dapat belajar dengan baik, dapat menerima mata kuliah dengan baik, bagaimana itu dapat terjadi bila terus terancam. Dari represi, teror serta bentuk-bentuk serupa, sering dirasakan oleh kawan-kawan mahasiswa Papua se-Jawa-Bali dan Makasar, dan juga di Papua. Info terbaru yang kami dapat, seorang pendeta hampir ditembak oleh militer dengan alasan yang tidak jelas. Artinya, militer sekarang sudah mulai melakukan penyisiran besar-besaran terhadap orang Papua. Salah satu sistem yang sedang dipakai militer adalah biomiliter yang membunuh dan memusnahkan rakyat, khususnya Papua dalam hal ini, sehingga kami sangat khawatir. Dan info-info ini sedang dipantau oleh Amnesty Internasional dan beberapa LSM atau NGO yang peduli mengenai pelanggaran HAM di seluruh dunia, khususnya di Papua. Baru saja kemarin, militer menembak dua orang mahasiswa Papua. Artinya, militer sudah mulai masuk, melakukan represi terhadap mahasiswa Universitas Cendrawasih di Jayapura, Universitas Papua di Manokwari dan beberapa perguruan tinggi di seluruh Papua. Di dalam kampus, staf pengajar itu bukan dosen-dosen murni; BIN, babinsa dan lainnya sudah masuk dan menyusup ke sana. Artinya, ruang gerak mahasiswa Papua dipersempit, dan sangat sulit untuk bergerak.

Kemudian, harapan AMP DIY ialah bahwa kami akan selalu solid berjuang bersama kawan-kawan pro demokrasi yang visi dan misi atau stratak dan platformnya sama, bagaimana kemudian berdasarkan kepentingan kita bersama. Dan AMP, selama 24 jam dan kapan pun, tidak menutup untuk menerima siapapun, dari latar belakangmu sampai pandangan politik, agamamu, rasmu, AMP memandangnya sama. Tapi AMP melihat bahwa yang terpenting, kamu bisa berjuang bersama rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang pro kepada rakyat. Itu harapan kami.

Kemudian harapan-harapan, rencana dan program ke depan yang akan dilakukan, salah satunya, kami akan coba menggalang solidaritas dengan kawan-kawan pro demokrasi, baik dari jurnalis, maupun siapapun yang peduli terhadap kemanusiaan, termasuk juga kawan-kawan Affinitas, saya kira kita bisa meluangkan waktu untuk datang. Dan harapan kami, kemudian kita bisa menyusun program bersama untuk menentang kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat Papua dan, secara umum, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, tidak menutup kemungkinan, siapapun boleh datang dengan visi dan misi yang sama bahwa kami dari, oleh dan untuk rakyat, untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan yang aman, damai dan tenteram. Kemudian, khususnya kawan-kawan *Jurnal Affinitas*, dalam hal ini saya mewakili seluruh kawan-kawan mahasiswa Papua yang ada di Yogya, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kawan-kawan untuk mempublikasikan apa yang menjadi persoalan-persoalan rakyat, khususnya rakyat Papua, dan seluruh rakyat Indonesia. Demi terwujudnya HAM dan demokrasi di daerah konflik, seperti Aceh dan Papua, maupun di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Dan mungkin ke depan nanti, kawan-kawan Affinitas dan Aliansi Mahasiswa Papua dapat membuat *planning* bersama bagaimana mempropagandakan, "ini *lho* yang sesungguhnya harus terjadi." Dan hal ini memang harus kami sosialisasikan kepada rakyat marjinal, bahwa mereka harus mengerti apa *sih* tujuan dari itu. Tidak ada kata-kata spesial lain yang bisa kami pesankan kepada kawan-kawan selain tanpa melawan, tidak akan pernah terwujud sistem yang pro kepada rakyat. Jadi, kami harus melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat.

Geliat Penyakit Tak Tertahankan

Rasisme adalah sebuah penyakit di abad kedua puluh
--Albert Camus

MERUJUK pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2002, rasisme adalah paham bahwa ras diri sendiri yang paling unggul. Ras merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengkategorikan manusia ke dalam beberapa bentuk. Selain bagi para penganutnya, rasisme merupakan sesuatu yang menampar kemanusiaan, yang jelas-jelas menimbulkan perbedaan yang dapat berimplikasi pada genosida. Sementara menurut beberapa pakar, konsep ras ini sangat lemah karena tidak memiliki basis ilmiah yang kuat.

Berangkat dari pembagian manusia ke dalam beberapa ras, yang tentu mengandung konsekuensi adanya kategori yang lebih baik dan yang lebih buruk, maka diskriminasi terhadap suatu individu atau kelompok tak akan dapat dielakkan. Biasanya, diskriminasi ini didasarkan atas prasangka berupa penilaian negatif, opini negatif, maupun perasaan tidak suka terhadap individu dan/atau kelompok dari suatu ras tertentu. Praktek rasisme, meski terasa nyata, seringkali sulit untuk diperalakan secara uji material, sehingga prasangka-prasangka negatif dapat terus tumbuh subur dan mengalami perputaran yang tak kunjung berakhir.

Sebagai contoh, ketika Amerika masih digelayuti awan gelap perbudakan, kaum kulit putih begitu mendominasi kaum kulit hitam dalam persoalan sosial-politik, bahkan kehidupannya secara umum. Belum lagi kesempatan ekonomi yang dipotong di tengah jalan. Beberapa waktu setelahnya, ketika perbudakan telah dihapuskan, beberapa kaum kulit putih "merasa bersalah" atas tindakan para pendahulu mereka. Untuk menebus dosa tersebut, mereka mencoba untuk menguntungkan kaum kulit hitam lewat berbagai cara. Generasi kulit hitam berikutnya memendam dendam yang dilampirkan pada generasi kulit putih yang sama sekali tidak tahu tentang dosa-dosa pendahulu mereka. Dan tak seorang pun dapat memilih warna kulit apa saat dilahirkan.

Sebagaimana klaimnya yang bias, rasisme pun memiliki kontradiksi dalam dirinya sendiri. Contoh ini bisa diambil dari fenomena persahabatan antara Soeharto dan konglomerat etnis Tionghoa Liem Sioe Liong--termasuk kroni-kroninya seperti Bob Hasan. Dalam beberapa sisi, rezim Orde Barunya Soeharto menelurkan banyak perundang-undangan yang mendiskriminasi--sekaligus mendiskreditkan--etnis Tionghoa (masih ingat nama-nama khas Tionghoa yang tiba-tiba harus "disulap", sehingga "Liem" pun berubah menjadi "Salim"?). Namun, di sisi lain, rezim ini tampak bersanding-bahagia dengan segelintir konglomerat Tionghoa. Contoh serupa terjadi di Jerman semasa komando kekuasaan dipegang oleh sang maniak, Hitler. Sekalipun kebijakan-kebijakan resmi Hitler berorientasi anti-semit, tapi masalah seputar muslihat keuangan dipercayakan kepada seorang Yahudi bernama Ephraim.*

Tentu saja, rasisme tidak berdiri sendiri ataupun sesuatu yang terbit tiba-tiba.

Rasisme dapat juga menjadi gerakan (pun kejahatan) politik dengan motif kekuasaan dan juga motif ekonomi. Ku Klux Klan dan Neo-Nazi merupakan contoh terbaik bagi gerakan politik rasis yang massif.

Rasisme yang (Seolah) Tidak Rasis

Dalam kehidupan sehari-hari, rasisme seringkali luput dari perhatian. Padahal, rasisme bukan sekedar Nazi dalam ide besarnya. Rasisme dapat eksis bahkan tanpa disadari. Contoh kecil dari rasisme yang diterima dengan senang hati, bahkan dengan pengorbanaan, adalah pemutih kulit, entah untuk wajah, lengan, ataupun tubuh secara keseluruhan. Dengan secara eksplisit menyembut kulit yang hitam sebagai sesuatu yang tidak cantik, tidak elegan, maupun stigma negatif lainnya, orang-orang yang terilhami oleh iklan mulai memburu produk-produk kosmetik yang dipercaya dapat menjadikan diri mereka lebih dihormati dan disanjung. Kata "hitam" dalam konteks ini bukan lagi sekedar kata yang merujuk pada warna. Lebih jauh, ia telah menjelma menjadi term peyoratif.

Pengondisian dan pendiskreditan rasis terus berlanjut dalam wilayah-wilayah yang tidak terduga sama sekali, dan bahkan telah dianggap sebagai sesuatu yang alamiah. Pandangan banyak orang di Jawa terhadap warga Indonesia Timur, misalnya. Banyak orang di Jawa berpandangan bahwa orang-orang dari wilayah Timur Indonesia mempunyai tabiat buruk seperti mengacau dan membuat onar, mabuk-mabukan, bahkan tidak berbudaya. Tentu saja hal ini bisa diperdebatkan secara panjang-lebar. Kalaupun dianggap benar, bahwa orang-orang dari Indonesia Timur merupakan pengacau atau pemabuk, ada persoalan besar yang harus dijawab: apakah di Jawa sendiri tidak ada warga pribumi yang berkelakuan seperti itu? Ketika orang Indonesia Timur melakukan tindakan destruksi atau meresahkan lingkungan sekeliling, mereka dianggap "biang kerok" dan disebut tidak berbudaya. Namun ketika yang melakukan tindakan itu orang Jawa atau Betawi, misalnya, mereka berapologi bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini merupakan contoh konkret dari dominasi kekuasaan yang Jawasentris.

Hal yang tak kalah memalukan adalah kasus seputar pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Beberapa kalangan, yang dianggap terpelajar, mengeluarkan pernyataan bahwa reaktor nuklir boleh saja dibangun pemerintah Indonesia, asalkan tidak di pulau Jawa.

Pengkategorian manusia atas sesuatu yang abstrak ini jelas perlu dikritisi dan dipertanyakan jika kita masih menghargai kehidupan dan kemanusiaan. Perjuangan untuk mengenyahkan rasisme tentu tak bisa dilakukan hanya dengan ide besar, tapi juga harus merujuk pada kenyataan hidup sehari-hari, tanpa memisahkan motif-motifnya yang saling terkait agar memberikan pemahaman yang tuntas dan tidak terpepetisi. Dan, "kita tak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang sampai setiap rasis telah tiada", begitu seru Chumbawamba, sebuah band-kolektif anarko-pop dari Inggris.

*Dikutip dari artikel berjudul *Rasialisme*, oleh Kenken.

Jurnal Affinitas merupakan kanvas kreasi yang diwarnai dengan semburat imaji dan realita lewat kacamata antioritarian yang kami lihat. Diterbitkan secara berkala, jurnal ini mengagendakan perayaan hidup lewat koreografi resistensi dari protagonis-protagonis revolusioner yang jenuh akan sistem penghambaan yang semakin hari semakin mereduksi hidup lewat deru percepatan produksi dan konsumsi yang sedemikian cepatnya, hingga sulit untuk direnungkan dan direngkuh. Dalam hidup yang bersandar pada

kualitas kehidupan yang mengerang ini, kami tidak melihat komponen tertentu akan mampu menyuarakan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang beragam. Kaum miskin kota, mahasiswa, para pekerja, petani, ibu rumah tangga, dan semua kelompok masyarakat yang disubordinasikan secara langsung oleh sistem uang

dan kerja, memiliki potensi radikalnya sendiri untuk bersuara merubah hidupnya yang kemudian akan menginspirasi kelompok lainnya secara horisontal. Hingga setiap orang tak lagi merasa asing pada kenyataan personal dan sosialnya: hingga setiap orang mampu mengakses apa yang menjadi kebutuhannya, tanpa perlu merampok sesama.